

PEMILIHAN UMUM DAN PENDIDIKAN POLITIK

A. Sudiharto DJIWANDONO

Indonesia masih tergolong negara berkembang (developing country). Ini antara lain juga berarti bahwa masyarakat Indonesia masih berada dalam proses mengembangkan dirinya ke arah masyarakat yang maju dan modern dalam seluruh aspek kehidupannya. Usaha untuk mencapai taraf kemajuan itu dilakukan melalui serangkaian usaha pembangunan nasional yang secara sistematis dan bertahap dimulai sejak Pelita I pada tahun 1969 dan yang terus berlanjut dan makin ditingkatkan dari satu Pelita ke Pelita berikutnya.

Peningkatan usaha pembangunan ini tidak hanya terlihat dari makin besarnya jumlah anggaran pembangunan dari tahun ke tahun dan dari periode Repelita ke Repelita berikutnya, tetapi juga pada makin luasnya jangkauan program-program pembangunan serta penggeseran titik berat usaha pembangunan sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan.

Satu hal yang harus diketengahkan ialah bahwa usaha pembangunan nasional yang dilakukan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti ekonomis, tetapi kesejahteraan lahir dan batin, material dan spiritual. Ia juga tidak hanya ditujukan kepada segolongan rakyat tetapi seluruh rakyat dan seluruh masyarakat Indonesia. GBHN 1978 menyebutkan bahwa pembangunan nasional dalam jangka panjangnya ditujukan kepada membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Di sini mengandung pengertian bahwa usaha pembangunan ditujukan kepada peningkatan mutu kehidupan manusia Indonesia secara utuh dan lengkap. Dan karena kehidupan manusia itu beraspek banyak dengan sendirinya

aspek. Tetapi di lain pihak disadari bahwa semuanya itu hanya dapat dicapai melalui usaha pembangunan ekonomi yang memungkinkan pengadaan prasarana dan sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan selanjutnya.

Oleh karena itu pembangunan bidang ekonomi menjadi prioritas utama terutama dalam tahap-tahap permulaan dari proses pembangunan nasional.

Sementara itu juga disadari bahwa sebagai salah satu syarat yang penting dan menentukan bagi usaha pembangunan ialah terjaminnya stabilitas nasional, terutama stabilitas dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Pengalaman dalam tahun-tahun 1950-an sampai pertengahan 1960-an menunjukkan bahwa tanpa adanya stabilitas tidak mungkin dilaksanakannya usaha-usaha pembangunan sebagaimana mestinya. Periode itu penuh dengan pertentangan-pertentangan ideologi politik antar golongan dalam masyarakat yang tidak memungkinkan terbinanya suatu sistem dan struktur politik yang menguntungkan bagi usaha pembangunan nasional.

Pembangunan yang sistematis dan terencana baru dapat mulai dilaksanakan pada tahun 1969 setelah sejak tahun 1966 dilakukan usaha-usaha stabilisasi, mula-mula sebagai reaksi terhadap usaha perebutan kekuasaan negara yang gagal oleh PKI pada tanggal 30 September 1965.

Namun ini tidak berarti bahwa pembangunan di bidang politik telah selesai. Sejalan dengan keberhasilan pembangunan nasional yang dititikberatkan pada pembangunan ekonomi, pembangunan di bidang politik harus terus-menerus dilakukan guna menunjang kelangsungan usaha-usaha pembangunan selanjutnya.

Dalam kerangka ini pemilihan umum harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan bidang politik dan merupakan salah satu bentuk dari pendidikan politik secara nasional.

INDONESIA SUATU NEGARA DEMOKRASI

Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan di dalam UUD Negara (UUD 1945) pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Ketentuan UUD tersebut menunjukkan bahwa di dalam *sistem* kenegaraan Indonesia kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang di dalam *struktur*

dengan demikian Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. Kedudukan sebagai lembaga negara tertinggi ini tercermin dalam hak-hak yang berdasarkan ketentuan UUD dimiliki oleh Majelis, yang terpenting adalah menetapkan UUD, memilih presiden dan wakil presiden, dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Bagaimana praktek dalam menjalankan kehidupan demokrasi tentu tidak selalu sama antara satu negara (atau bangsa) dengan bangsa lainnya. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing bangsa mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri yang dalam prosesnya selama berabad-abad telah membentuk kepribadian, budaya, identitas dan pandangan serta persepsi bangsa tentang kehidupan dengan segala aspeknya. Meskipun demokrasi sebagai ideal mempunyai sifat yang universal yang esensinya tidak lain adalah diakuinya dan dilaksanakannya hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian suatu negara adalah demokratis apabila dalam negara itu hak-hak asasi manusia diakui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan di dalam struktur kenegaraan dan pemerintahan secara nyata menempatkan kedaulatan dan kekuasaan negara di tangan rakyat. Sistem demokrasi menuntut pemerintahan yang terbatas kekuasaannya (a limited government), yang melakukan tugas pemerintahannya berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan yang ditentukan oleh rakyat dan yang harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Bagi bangsa Indonesia asas-asas demokrasi itu ingin diwujudkan sesuai dengan persepsi bangsa Indonesia yang tumbuh dan berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri sebagaimana dirumuskan sebagai sila keempat dari dasar negara, Pancasila.

Oleh karena itu demokrasi Indonesia juga disebut sebagai Demokrasi Pancasila. Secara umum hal ini dapat diartikan bahwa asas demokrasi di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan apa yang dirumuskan sebagai sila keempat dari Pancasila dan dilandasi oleh filsafat Pancasila sebagai satu keseluruhan. Sebagaimana diketahui Pancasila adalah suatu rumusan filosofis. Ia adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Ini semua jelas menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia merupakan konsep demokrasi yang sangat lengkap. Ia adalah suatu asas demokrasi, yang sekaligus berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan yang diarahkan kepada terwujudnya ke-

Namun kehidupan demokrasi adalah suatu proses. Proses ini hanya akan berjalan lancar dan terus meningkat menuju ke taraf yang lebih baik dan lebih sempurna apabila secara terus-menerus dilakukan usaha-usaha yang mendorong dan mengembangkannya ke arah yang benar. Meskipun dari uraian di muka dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada dasarnya secara naluri adalah bangsa yang berjiwa dan berpandangan hidup Pancasila, yang secara implisit juga berarti berjiwa dan berpandangan demokratis, naluri tersebut perlu dikembangkan melalui berbagai jalan dan cara, yang secara sadar direncanakan dan dilaksanakan secara konsisten.

Kehidupan demokrasi modern juga menuntut taraf kecerdasan tertentu tidak saja bagi para pemimpin tetapi bagi seluruh rakyat karena mekanisme dalam kehidupan demokrasi hanya akan berjalan wajar dan sehat apabila setiap orang memiliki kesadaran dan pengertian yang cukup akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing.

Orang juga memerlukan "latihan" dan pengalaman yang akan lebih memperdalam kesadaran dan pengertiannya dalam hidup kemasyarakatan dan kenegaraan sehingga dapat berpartisipasi secara positif dalam kerangka sistem demokrasi yang berlaku.

Di sini tampak jelas peranan yang sangat penting dari pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal.

Peningkatan taraf kecerdasan rakyat hanya dapat dilakukan melalui usaha dan kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan formal. Bisa dimengerti apabila negara-negara yang baru merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia II, termasuk Indonesia, sejak tahun-tahun pertama masa kemerdekaannya memusatkan perhatian pada pembangunan bidang pendidikan dalam rangka mengisi kemerdekaan yang diperolehnya baik secara damai maupun melalui suatu revolusi bersenjata seperti Indonesia.

Pembangunan bidang pendidikan ini umumnya ditujukan untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dari sistem pendidikan kolonial kepada sistem pendidikan nasional yang lebih relevan dengan kepentingan nasional masing-masing. Setiap negara pasti berusaha untuk menjadikan warga negaranya manusia-manusia yang memiliki kecerdasan intelektual yang cukup, memiliki ketrampilan-ketrampilan tertentu untuk melakukan pekerjaan secara baik sesuai dengan fungsi masing-masing, dan sekaligus memiliki semangat kebangsaan yang tebal yang berkesadaran tinggi akan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Tuntutan jaman modern terhadap dunia pendidikan memang makin besar

pada umumnya pendidikan hanya ditujukan pada peningkatan kecerdasan intelektual anak didik dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan/atau ketrampilan-ketrampilan vokasional tertentu. Aspek-aspek lain yang bersangkutan dengan pengembangan kepribadian seseorang umumnya dipandang sebagai tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan lingkungan keluarga. Sementara itu pendidikan, khususnya pendidikan formal, berperan secara tidak langsung. Seseorang yang kecerdasan intelektualnya meningkat diharapkan akan mampu meningkatkan kepribadian dan mentalitasnya. Konsep ini terutama berkembang di negara-negara Barat.

Tetapi dengan makin mengendurnya peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan sebagai efek sampingan dari proses modernisasi, lembaga-lembaga pendidikan formal sejauh mungkin harus dapat mengisi kekosongan yang timbul. Pendidikan tidak lagi hanya berkepentingan terhadap peningkatan kecerdasan intelektual tetapi sekaligus harus juga mampu mengembangkan kepribadian dengan menginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Ini berarti bahwa melalui kegiatan di bidang pendidikan formal diharapkan terbentuknya warga negara yang berkepribadian utuh, yang cerdas secara intelektual, berkecakupan, sekaligus juga berkesadaran tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dan dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bangsanya.

Dalam kaitannya dengan kehidupan politik dan kenegaraan berarti bahwa pendidikan formal juga menjalankan apa yang disebut "pendidikan politik," dalam arti bahwa pendidikan formal melalui kegiatan kurikulumnya juga menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kebangsaan yang berlaku dalam hidup kemasyarakatan termasuk kehidupan politik dan kenegaraan. Meskipun kebanyakan pendidikan ke arah penyadaran hak dan kewajiban politik warga negara dalam pendidikan formal tidak dilakukan secara terbuka tetapi melalui "kurikulum terselubung" seperti civics, social studies, social education dan sebagainya. Bahkan menurut Willem Langeveld,¹ satu-satunya negara (Barat) di mana "pendidikan politik" diterima secara umum hanyalah di Republik Federasi Jerman. Kata "politik" biasanya dihindari karena politik selalu dipandang sebagai suatu kegiatan yang kotor (a dirty business) yang harus dijauhkan dari anak didik. Politik juga selalu dihubungkan dengan konflik, sedangkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan justru membutuhkan iklim yang harmonis. Politik juga sering diartikan sama dengan partai politik, yang tentu saja tidak tepat.

¹Willem Langeveld: "Political Education as a Principle: Problems, Examples, and Ideas."

Tetapi bagaimanapun juga "pendidikan politik" bagi warga negara diperlukan oleh setiap negara dan dilaksanakan di banyak negara baik secara terbuka maupun secara terselubung, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal atau melalui jalan dan cara lainnya. Materi pendidikan politik tentu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya karena masing-masing negara dan bangsa memiliki latar belakang, sejarah dan kebudayaan sendiri yang menentukan corak kehidupan bangsa termasuk kehidupan politiknya.

PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA

Indonesia sebagai negara demokrasi yang masih tergolong negara berkembang mempunyai permasalahan sendiri yang tentu tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan negara-negara maju, bahkan dalam beberapa hal juga tidak selalu dapat diperbandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Konsep demokrasi yang dikembangkan di Indonesia tidak lagi merupakan masalah karena konsep demokrasi Indonesia atau demokrasi Pancasila telah diterima secara nasional pada saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Konsep ini makin lama makin diperjelas terutama sejak kelahiran Orde Baru pada tahun 1966, dan sejalan dengan pembangunan nasional di mana di dalamnya termasuk juga pembangunan bidang politik, usaha-usaha lebih diarahkan kepada pelaksanaan konsepsi demokrasi tersebut secara murni dan konsekuen.

Usaha pembangunan politik dalam rangka implementasi konsep demokrasi Indonesia ini pada dasarnya merupakan usaha yang sangat penting dan menyangkut kegiatan-kegiatan yang luas dan dalam. Usaha ini penting karena perkembangan di masa depan akan banyak tergantung dari keberhasilan usaha sekarang. Usaha ini tidak hanya merupakan kelanjutan dari tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tahun 1950-an sampai pertengahan tahun 1960-an, tetapi sekaligus harus dapat menjamin bahwa di masa depan kehidupan demokrasi di Indonesia akan tetap berkembang secara konsisten, yaitu tetap dilandasi oleh pandangan dan filsafat Pancasila.

Sementara itu Indonesia sebagai negara berkembang dan pernah mengalami masa penjajahan selama 350 tahun masih menghadapi berbagai kelemahan institusional yang tentu membawa pengaruh juga dalam mekanisme kehidupannya. Kelemahan institusional dan mekanisme ini meru-

rendah yang merupakan gejala umum dari suatu masyarakat yang sedang berkembang dan masih dalam proses menuju kehidupan yang lebih maju dan lebih modern.

Pembangunan politik di Indonesia dengan demikian meliputi kegiatan-kegiatan yang secara umum ditujukan ke arah makin mantapnya demokrasi Pancasila. Usaha pemantapan ini seperti dikemukakan di muka, menyangkut kegiatan-kegiatan yang luas dan dalam karena di dalamnya termasuk usaha pengembangan kelembagaan-kelembagaan politik, mekanisme hubungan antar lembaga, serta yang tidak kalah pentingnya ialah memberikan "pendidikan" kepada warga negara sebagai pelaku dan partisipan kehidupan politik. Setiap warga negara diharapkan memiliki pengertian dan kesadaran politik yang cukup sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dari suatu negara demokrasi yang memiliki ciri-ciri yang khas sesuai dengan dasar filsafat dan pandangan hidup yang melandasinya.

Di sini jelas peranan pendidikan dalam rangka pembangunan politik. Peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara akan berjalan sejajar dengan peningkatan kecerdasan dan pengembangan intelektual yang hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Seperti telah disinggung, di samping peningkatan kecerdasan kegiatan pendidikan juga diharapkan mampu menumbuhkan pengertian yang lebih mendalam terhadap dasar falsafati negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sejarah, cita-cita dan tujuan bangsanya, dan dengan demikian juga menumbuhkan dan mengembangkan perasaan cinta tanah air dan bangsanya, kesediaan untuk mengabdikan dan berkorban, antara lain dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang sebelumnya disebut "civics" pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah "Pancasila" atau "Ideologi Negara" pada tingkat pendidikan tinggi menunjukkan bahwa pendidikan (formal) di Indonesia, seperti juga di banyak negara lain, mengandung juga aspek pendidikan politik. Meskipun seperti di banyak negara lainnya, juga di Indonesia istilah "pendidikan politik" tidak/belum dipakai di lingkungan pendidikan formal.

Tetapi istilah pendidikan politik secara resmi dipakai oleh lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagaimana diketahui, di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1978 Bab IV antara lain disebutkan:

"Pendidikan politik rakyat ditingkatkan, agar makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pem-

Mengapa istilah "pendidikan politik" tersebut secara eksplisit dipakai mungkin mempunyai latar belakang pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. *Pertama*, pertimbangan yang bersifat edukatif, agar gambaran umum tentang politik sebagai sesuatu yang kotor, yang bersifat polusi, penuh pertentangan dan sebagainya itu, makin lama makin terhapus dan di masyarakat tumbuh pengertian yang wajar dan sehat tentang politik. Orang tidak perlu takut politik dan menjauhi politik, karena sadar atau tidak, mau atau tidak mau, setiap warga negara dari suatu negara sebenarnya terus-menerus terlibat dalam politik. Kehidupan kenegaraan pada dasarnya adalah kehidupan politik.

Kedua, untuk memberikan tekanan bahwa peningkatan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan perkataan lain peningkatan kesadaran politik rakyat, perlu dilakukan melalui usaha sadar dan terencana, dalam hal ini melalui kegiatan pendidikan, sehingga lebih efektif dan lebih menjamin tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti pernah terjadi di masa yang lalu.

Sebenarnya tanpa usaha sadar dan terencana pun proses penyadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat dengan sendirinya berjalan dalam masyarakat melalui apa yang dikenal sebagai proses sosialisasi atau sosialisasi politik. Di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan masyarakat pada umumnya terjadi interaksi-interaksi sosial, dan di dalam interaksi sosial tersebut terjadilah transfer nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan kemasyarakatan, termasuk kehidupan kenegaraan. Orang juga belajar dari pengalaman-pengalaman empiris yang setiap hari diperoleh dalam praktek hidup bermasyarakat.

Lebih-lebih di masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan itu masih dijunjung tinggi, proses sosialisasi nilai-nilai itu berjalan cukup lancar dan efektif.

Tetapi di dalam proses sosialisasi bukannya tidak ada risiko. Karena proses ini berjalan secara "bebas" dalam pergaulan masyarakat, kemungkinan terjadinya penyimpangan dan salah arah cukup besar. Unsur-unsur ideologi politik yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tetap harus diperhitungkan dan dicegah agar tidak sampai berkembang dalam masyarakat dan meracuni masyarakat.

Ini memberi alasan mengapa pendidikan politik itu penting dan perlu dilakukan. Perlu adanya usaha dan kegiatan yang secara sadar dan terencana baik dilakukan guna meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga setiap

negara, menjalankan peranannya secara aktif dan sadar karena memiliki tingkat kesadaran yang cukup akan hak-hak dan kewajibannya. Kesadaran ini timbul karena keyakinan yang mendalam akan kebenaran nilai-nilai dasar yang melandasi kehidupan kenegaraan di mana ia terlibat di dalamnya.

Apakah pendidikan politik bebas dari risiko? Pendidikan politik seperti juga pendidikan pada umumnya tentu juga mengandung risiko. Suatu sistem pendidikan mungkin tidak mencapai hasil sebagaimana ditetapkan semula karena adanya kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan tertentu di dalamnya. Dalam dunia pendidikan pada umumnya dituntut adanya seperangkat komponen yang saling menunjang keberhasilannya, antara lain kurikulum yang relevan, sarana-sarana fisik, metoda penyampaian pelajaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah unsur manusia yang melaksanakan pendidikan itu, terutama para pendidik. Peranan pendidik ini lebih-lebih akan sangat menentukan dalam hubungannya dengan pembentukan watak dan kepribadian, pengembangan sikap, pandangan dan tingkah laku. Di sini diperlukan perbuatan (action) dan contoh-contoh konkrit, yang hanya dapat diberikan oleh pendidik yang pada dirinya memang memiliki mutu kepribadian seperti itu. Di samping itu keberhasilan pendidikan juga banyak ditentukan oleh "suasana pendidikan" yang ada di sekelilingnya.

Oleh karena itu pendidikan politik harus direncanakan secara baik dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bagi bangsa Indonesia, pendidikan politik itu sudah menjadi keputusan politik. Oleh karena itu pendidikan politik harus dilaksanakan melalui berbagai jalan dan cara.

Jalan yang pertama melalui pendidikan formal sebagaimana di muka telah dikemukakan, meskipun di lingkungan pendidikan formal istilah pendidikan politik tidak dipakai secara eksplisit. Di samping pendidikan formal melalui sekolah-sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, pendidikan politik juga dilakukan melalui pendidikan non-formal, melalui organisasi-organisasi masyarakat, khususnya organisasi-organisasi pemuda. Organisasi-organisasi pemuda telah memiliki tradisi yang cukup lama di Indonesia dan telah terbukti peranannya dalam perjuangan nasional sejak masa kolonial, masa revolusi dan masa pembangunan sekarang. Semangat cinta tanah air dan bangsa, cinta kemerdekaan dan sikap anti penjajahan dalam segala bentuknya telah berhasil ditumbuhkan dan dikembangkan terutama oleh organisasi-organisasi pemuda. Dalam rangka pendidikan politik sekarang peranan itu diharapkan akan tetap besar sehingga perlu diciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan organisasi-

Pendidikan politik juga dilaksanakan melalui pendidikan masyarakat dan dalam hubungan ini peranan media massa, baik media cetak maupun elektronika tentu sangat besar.

Yang perlu segera ditambahkan di sini ialah bahwa dengan pendidikan politik seperti uraian-uraian di muka Indonesia tidak menuju kepada negara totaliter. Hal ini tidak mungkin terjadi karena pendidikan politik dilakukan justru dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi Pancasila. Apa yang hendak dicapai dengan pendidikan politik adalah kesadaran, semangat atau jiwa demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang menjadi dasar falsafah negara, yaitu Pancasila.

Hal itu perlu dilakukan karena masyarakat Indonesia masih dalam taraf berkembang menuju kehidupan yang lebih maju dan lebih modern. Proses perkembangan itu perlu diarahkan ke arah yang sesuai dengan dasar, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, antara lain melalui apa yang dikenal sebagai pendidikan politik.

PEMILIHAN UMUM DAN ARTINYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK

Pada tanggal 4 Mei 1982 Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum di mana rakyat Indonesia yang berdasarkan ketentuan undang-undang telah mempunyai hak pilih memberikan suaranya guna memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan dan permusyawaratan di pusat dan di tingkat daerah. Ini adalah pemilihan umum yang keempat dalam sejarah Republik Indonesia dan merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan dalam masa pemerintahan Orde Baru.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting. Ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pemilihan umum sering kali dijadikan ukuran sejauh mana kadar demokrasi dari sesuatu negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Setiap pengamat selalu ingin mengetahui apakah pemilihan umum itu benar-benar dilaksanakan secara bebas dan rahasia, tanpa tekanan dari pihak mana pun, dan diorganisasi secara baik dan bersih, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Berapa banyak pemilih yang menggunakan haknya juga bisa dijadikan ukuran sejauh mana tingkat kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara atau tingkat kesadaran politik warga negara.

Dari kedua ukuran di atas terbukti bahwa pemilihan umum di Indonesia

dan sama sekali bukan sekedar formalitas dan seremoni belaka. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia yang menjamin setiap pemilih menggunakan haknya berdasarkan kesadaran dan kata hatinya.

Dari segi jumlah pemilih yang menggunakan haknya ternyata bahwa lebih dari 90% pemilih menggunakan haknya dalam pemilihan umum. Data-data yang dapat dikumpulkan sejak Pemilihan Umum tahun 1971 sampai Pemilihan Umum tahun 1982 menggambarkan keadaan sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penduduk	Pemilih yang Terdaftar	Suara yang Sah	% yang Menggunakan Hak Pilih
1971	114.190.163	58.179.245	54.696.887	94,02*
1977	129.977.596	70.662.155	63.998.344	90,57
1982	147.490.298	82.082.934	75.014.980	91,33

* Tidak termasuk Irian Jaya.

Dalam hubungannya dengan pendidikan politik pemilihan umum dapat dilihat sebagai salah satu sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat. Bagi warga negara yang telah memiliki hak pilih, pemilihan umum memberikan pengalaman praktis bagaimana mereka selaku warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan dengan cara menggunakan hak pilihnya. Dan bagi generasi muda yang belum memiliki hak pilih, pemilihan umum mendemonstrasikan secara nyata bagaimana mekanisme demokrasi itu berjalan, di mana pada suatu saat nanti mereka juga akan terlibat secara langsung.

Pemilihan umum juga mempunyai arti pendidikan bagi organisasi-organisasi sosial politik peserta pemilihan umum. Dari pengalaman menjadi peserta pemilihan umum mereka dapat belajar banyak, khususnya tentang strategi dan taktik memenangkan suara dalam sistem yang berlaku, tentang bagaimana melakukan kampanye pemilihan umum secara baik, efisien dan efektif. Organisasi-organisasi sosial politik juga perlu menyadari bahwa melalui kampanye yang baik mereka telah melakukan pendidikan politik rakyat, yang pada gilirannya juga akan memberikan pengaruh positif dalam perjuangan politik mereka.

Dari segi masyarakat pada umumnya tampak bahwa keikutsertaan masya-

catatan data di muka, dalam Pemilihan Umum 1982 pemilih yang menggunakan haknya sebesar 91,33% dari pemilih yang terdaftar. Tentu tidak mungkin diketahui secara pasti apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut benar-benar menggunakan haknya atas dasar kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Mungkin juga ada di antaranya yang memandang pemberian suara dalam pemilihan umum lebih sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Atau bisa juga terjadi bahwa seorang pemilih menjatuhkan pilihannya tidak atas kesadaran dan keyakinannya tetapi sekedar menunjukkan bahwa ia adalah seorang warga negara yang baik.

Kemungkinan-kemungkinan semacam itu bisa terjadi mengingat masyarakat Indonesia yang masih dalam taraf berkembang di mana taraf kecerdasan dan kesadaran politik masih harus ditingkatkan. Sekali lagi di sini pendidikan politik memegang peranan penting.

Dengan demikian kita melihat adanya hubungan timbal-balik antara pemilihan umum dan pendidikan politik. Di satu pihak pemilihan umum dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, di lain pihak pendidikan politik akan lebih memberikan arti terhadap pemilihan umum. Melalui pendidikan politik yang berhasil pemilihan umum akan lebih berfungsi dalam kehidupan demokrasi dan kehidupan kenegaraan pada umumnya.

PERANAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK

Telah dikemukakan bahwa pemilihan umum juga mempunyai arti pendidikan bagi setiap organisasi sosial politik peserta pemilihan umum. Organisasi sosial politik yang berdasarkan ketentuan undang-undang menjadi peserta dalam pemilihan umum dapat menarik banyak pelajaran dari pengalaman sebagai peserta sehingga dalam pemilihan umum mendatang masing-masing akan tampil lagi sebagai peserta secara lebih mantap.

Apa yang kiranya pantas mendapatkan perhatian dari pengalaman pelaksanaan Pemilihan Umum 1982 adalah kegiatan kampanye yang dilakukan oleh organisasi-organisasi sosial politik peserta pemilihan umum menjelang pelaksanaan pemungutan suara.

Kampanye politik dan pemilihan umum merupakan kegiatan-kegiatan yang sudah melembaga dalam sistem demokrasi, meskipun kita tidak perlu begitu saja meniru dengan menerapkan pola yang berlaku atau biasa berlaku di negara-negara demokrasi lainnya. Kampanye politik dalam rangka pemi-

sebagaimana juga kita menerapkan asas demokrasi dalam kehidupan politik kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai dasar yang kita yakini.

Meskipun kita bersyukur bahwa Pemilihan Umum 1982 pada akhirnya telah dapat kita lalui dengan sukses, tentu kita tidak harus menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan yang ada khususnya dengan terjadinya insiden-insiden kekerasan di beberapa tempat selama berlangsungnya masa kampanye.

Kampanye politik dalam rangka pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para "kontestan" guna menanamkan pengaruh dan simpati di kalangan masyarakat dengan menjelaskan program-program perjuangan politiknya bagi kepentingan bangsa dan negara, sehingga dengan cara demikian masing-masing kontestan berusaha untuk meraih suara sebanyak-banyaknya pada saat pemungutan suara.

Kiranya adalah wajar apabila kegiatan kampanye selalu mengandung unsur-unsur persaingan di antara para "kontestan" peserta pemilihan umum karena masing-masing tentu berusaha untuk keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan suara terbanyak. Namun yang harus pula disadari ialah bahwa dengan melalui kampanye politik yang baik organisasi sosial politik dapat berperan secara efektif dalam rangka pendidikan politik rakyat.

Mengingat tanggung jawab ini kampanye pemilihan umum perlu benar-benar dilaksanakan secara baik, menjadi sarana komunikasi dan interaksi yang efektif dalam rangka menyampaikan informasi-informasi, dengan sejauh mungkin mencegah terjadinya eksek yang tidak diharapkan seperti tindak kekerasan, cara-cara paksaan dan intimidasi yang menimbulkan perasaan takut dan waswas yang meluas di kalangan masyarakat.

Kampanye yang tidak mengindahkan faktor-faktor komunikasi yang seharusnya akan menjadi tidak komunikatif, tidak informatif dan tidak edukatif, bahkan mungkin akan menjadi bumerang yang merugikan bagi pelaku kampanye sendiri. Bukan simpati yang diperoleh tetapi justru antipati.

Masalah ini telah banyak dibahas dan ditulis di media massa khususnya surat-surat kabar dalam bulan-bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 1982. Kiranya memang perlu direnungkan kembali dan dicari cara-cara yang lebih baik dalam penyelenggaraan kampanye politik untuk pemilihan-pemilihan umum mendatang. Fungsi kampanye sebagai forum komunikasi untuk menyampaikan informasi politik dari para peserta pemilihan umum kepada masyarakat calon pemilih dan sebagai sarana pendidikan politik rakyat harus benar-benar dapat diwujudkan dalam masa pemilihan umum ber-